

Pemprov DKI Temukan 75 Ribu Penerima KJP Tak Tepat Sasaran

JAKARTA (IM) - Pemprov DKI Jakarta menemukan lebih dari 75 ribu Kartu Jakarta Pintar (KJP) salah sasaran. Temuan ini didapat setelah dilakukan verifikasi ulang bansos pendidikan oleh Dinas Pendidikan.

"Data penerima KJP Plus Tahap 1 Tahun 2023 adalah DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) per Februari 2022 ditambah per November 2022 sebanyak 662.194 anak usia 6-21 tahun. Setelah dilakukan uji kelayakan dan verifikasi, hasilnya sebanyak 75.497 tidak layak," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kadisdik DKI Jakarta, Purwosusilo, dalam keterangan tertulis, Rabu (11/10).

Menurutnya, dari 75.497 orang penerima yang tidak tepat sasaran tersebut, yang disebabkan blank sebanyak 36 orang, alamat tidak ditemukan sebanyak 22.024, anggota keluarga PNS/TNI/Polri sebanyak 1.219, memiliki mobil sebanyak 21.462, dan memiliki NJOP di atas Rp 1 miliar sebanyak 1.244.

Selain itu, keluarga mampu sebanyak 16.371 orang, meninggal dunia sebanyak 406 orang, pindah ke luar DKI Jakarta sebanyak 11.867 orang, tidak padan dengan data Kementerian Dalam Negeri sebanyak 862 orang, dan tidak dilakukan musyawarah kelurahan (muskel) sebanyak 6 penerima.

"Di luar DTKS per Februari 2022 dan per November 2022 di atas, masih ada penerima KJP Plus lanjutan (existing) tahun 2022 yang belum terdaftar dalam DTKS, yakni sebanyak 108.018 orang. Terhadap data ini juga dilakukan uji kelayakan dan verifikasi ulang untuk memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat bansos KJP Plus,"

ujarnya.

Purwosusilo mengatakan sebanyak 20.198 tidak layak dengan rincian karena alamat tidak ditemukan sebanyak 6.484, anggota keluarga PNS/TNI/Polri sebanyak 659, memiliki mobil sebanyak 1.721, dan memiliki NJOP di atas Rp 1 miliar sebanyak 85 penerima.

Kemudian, dinilai tidak miskin oleh masyarakat setempat sebanyak 2.174, sumber air minum menggunakan kemasan bermerek 22, meninggal dunia sebanyak 27, pindah (tidak diketahui alamatnya) 7.005, pindah ke luar DKI Jakarta 1.675, dan lain-lain 346 penerima.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono juga mengungkap adanya penerima KJP menyalahgunakan yang dibelinya dari program subsidi pangan Pemprov DKI. Heru Budi menegaskan tindakan itu dilarang.

"KJP nggak bisa dijual-belian, KJP itu untuk baju, tas, alat sekolah. Kalau tadi disampaikan dijual-belian itu adalah subsidi pangan untuk penerima KJP," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (28/7).

Subsidi pangan sendiri telah digelontorkan oleh Pemprov DKI sejak 2016. Adapun penerima KJP merupakan salah satu golongan masyarakat yang berhak menerima bantuan pangan bersubsidi.

Heru menekankan subsidi pangan diberikan supaya anak yang bersekolah kebutuhan pokoknya terjamin. Apabila terjadi praktik tersebut, Heru mengancam akan memberhentikan subsidi pangan yang telah digelontorkan. ● yan

4 | Metropolis

FOTO/ANTARA



USULAN GANJIL GENAP SEPEDA MOTOR DI JAKARTA

Sejumlah kendaraan sepeda motor terjebak macet di Terowongan Semanggi, Jakarta, Rabu (11/10). Pemprov DKI Jakarta mengkaji usulan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait penerapan kebijakan ganjil genap bagi kendaraan roda dua di beberapa ruas jalan guna memperbaiki kualitas udara di Jakarta.

Masa Jabatan Pj Heru Mau Habis, Kemendagri: Insya Allah Diperpanjang

Heru Budi Hartono tak ambil pusing soal nasibnya setelah masa jabatannya memimpin Ibu Kota berakhir pada 17 Oktober 2023. Dia menyerahkan keputusan apakah lanjut atau tidak menjadi Pj Gubernur DKI kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

JAKARTA (IM) - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Suhajar Dian-toro menyebut masa jabatan Heru Budi Hartono sebagai penjabat (pj) gubernur DKI Jakarta kemungkinan akan diperpanjang. Masa jabatan Heru diketahui akan habis pada 17 Oktober 2023.

"Insya Allah," kata Suhajar singkat ketika ditanya apakah masa jabatan Heru akan diperpanjang.

Suhajar kembali merespons dengan singkat ketika ditanya apakah kemungkinan memperpanjang masa jabatan itu didasarkan atas kinerja Heru yang cukup baik

memimpin Jakarta selama setahun terakhir. "Alhamdulillah," ucapnya, di Jakarta, Rabu (11/10).

Tak Ambil Pusing

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono tak ambil pusing soal nasibnya setelah masa jabatannya memimpin Ibu Kota berakhir pada 17 Oktober 2023. Dia menyerahkan keputusan apakah lanjut atau tidak menjadi Pj Gubernur DKI kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Asli jabatan saya Kepala Sekretariat Presiden ditugaskan menjadi Pj Gubernur ya terserah yang menugaskan,

terserah yang menilai, Kemendagri," kata Heru saat ditemui di Kantor Lurah Pekojaan, Jakarta Barat, Rabu (11/10).

Dia mengatakan, saat ini, dirinya hanya fokus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di DKI Jakarta. Eks Wali Kota Jakarta Utara itu pun akan lanjut menjadi nahkoda Ibu Kota selama setahun apabila Kemendagri memperpanjang masa jabatannya sebagai Pj Gubernur DKI.

"Ya nggak kepingin-kepingin, ya kerja. Ya (kalau) ditugasin, ya silakan," ujarnya.

Heru menjabat Pj Gubernur DKI sejak 17 Oktober 2022. Dia menggantikan sementara posisi gubernur yang ditinggalkan Anies Baswedan. Kemendagri telah dua kali mengevaluasi kinerja Heru dan memberikan beberapa saran. Misalnya soal penanganan banjir Jakarta.

Heru juga mendapat kritik dari Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta seputar gaya komunikasinya selama memimpin Jakarta hampir setahun ini.

PDIP DKI merasa anak buah Presiden Joko Widodo alias Jokowi itu perlu memperbaiki komunikasi publik.

Merespons kritik itu, Heru

Budi berujar akan memperbaiki komunikasinya. "Kalau itu dinilai kurang, ya namanya orang nilai kurang ya enggak apa-apa juga," katanya. ● yan

Komisi D DPRD DKI Soroti Kurangnya Penanganan Sampah di Kawasan Pasar

JAKARTA (IM) - Komisi D DPRD DKI Jakarta menyoroti absennya penanganan sampah dalam rencana kerja anggaran (RKA) Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Komisi D lantas mempertanyakan keseriusan DLH melakukan penanganan darurat sampah yang terjadi di tempat pembuangan akhir (TPA) Bantargebang.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah dalam rapat pendalaman dan pembahasan Raperda APBD DKI Jakarta 2024 di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat.

Ida mengatakan, selain sampah rumah tangga, volume sampah yang dihasilkan pasar dan kawasan komersil bisnis juga fantastis. Karena itu, dia memandang perlunya terobosan program kerja dan ketegasan menegakan aturan perlu oleh DLH.

"Buat program agar sampah ini terselesaikan dengan baik. Pasar kita ini banyak sampahnya. Sampah ini harus selesai dengan baik tapi tidak membebani APBD. Begitu juga sampah kawasan (komersil bisnis) itu PR (pekerjaan rumah) kita," kata Ida dalam keterangannya, Rabu (11/10).

Sementara itu, Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto menjelaskan kewajiban pasar untuk mengelola sampah secara mandiri sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Namun ia mengakui implementasinya belum optimal.

"Memang dari semenjak terbitnya Perda tersebut hingga saat ini, pasar-pasar ini masih sangat bergantung pada Dinas LH untuk pengangkutan sampahnya," jelas Asep.

Asep menuturkan sejauh ini, pihaknya bersama Perumda Pasar Jaya sedang merancang pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS3R) di Pasar Induk Kramat Jati untuk menjadi percontohan, dengan harapan sampah dari pasar tidak di buang ke TPA Bantargebang lagi.

"Rencananya di tahun ini saya sudah minta ke Perumda Pasar Jaya untuk dapat membangun TPS di pasar tersebut. Sampai saat ini masih kami bahas bersama, karena memang sampah Pasar Induk Kramat Jati bisa mencapai 150 ton perhari," jelasnya.

Asep juga menjelaskan saat ini 20% sampah yang dibuang ke TPA Bantargebang merupakan sampah dari kawasan komersil bisnis. Ia pun menyoal hal tersebut, sebab sudah ada payung hukum berupa Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 102 Tahun 2021 yang mewajibkan pengelola kawasan bisnis menangani sampah secara mandiri atau bekerjasama dengan pihak ketiga.

"Dari lima ribuan kawasan komersial di Jakarta baru 500 kawasan yang sudah dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Selebihnya belum. Memang pengangkutan sampahnya dari swasta, tapi dibuangnya masih di Bantar Gebang. Nanti akan kita upayakan untuk mencari jalan keluarnya," tandasnya. ● yan

Kebakaran di Tanah Abang

JAKARTA (IM) - Musibah kebakaran melanda permukiman warga di Jalan Karet Pasar Baru Dua, Tanah Abang, terbakar pada Rabu (11/10) pagi. Amukan api semakin membesar dan terus membakar seluruh bangunan di dalam gang. Angin kencang dan bangunan semi permanen membuat api dengan cepat merambat ke bangunan lainnya.

Api yang sempat membesar membuat sejumlah warga panik, berusaha menyelamatkan harta benda mereka yang masih dapat diselamatkan. Salah seorang warga mengatakan bahwa api diduga berasal dari lantai dua sebuah rumah yang dijadikan kamar indekos. "Dugaan semen-

tara, korsleting listrik dari rumah lantai 2 milik Bapak Sunar, kayaknya kos-kosan. Ada 6 kamar, 14 orang, di RT 9 RW 7, Gang Buaya 2. Tidak ada korban, alhamdulillah. Jadi, awalnya api muncul dari rumah Pak Sunar, kemudian merembet ke bangunan lainnya," kata Supri.

Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat yang tiba di lokasi segera berupaya melakukan proses pemadaman. Setelah berjibaku selama sekitar satu jam dengan menerjunkan sebanyak 20 unit mobil Damkar, akhirnya api berhasil dipadamkan.

Belum diketahui dengan pasti penyebab terjadinya kebakaran. Dugaan sementara menyebutkan bahwa api berasal dari hubungan arus pendek listrik.

"Kami menerima laporan kebakaran dan segera meluncur untuk melakukan pemadaman. Kita mengirimin 15 unit mobil pemadam. Dugaan sementara adalah korsleting listrik. Bangunan semi permanen. Alhamdulillah, warga turut membantu dalam pemadaman," ucap Marwono, Perwira piket Damkar.

Sehari sebelumnya, kebakaran juga melanda dua rumah di kawasan Kebon Pala Tiga, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/10) sore. ● yan



PEMBAGIAN MAKANAN GRATIS DI JAKARTA

Petugas membagikan makan siang gratis kepada warga di Jalan Kramat Pulo, Senen, Jakarta, Rabu (11/10). Yayasan Damaris Pancasila membagikan 300 porsi makan siang gratis setiap hari Rabu di kawasan tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama.

NGOPI BARENG INSAN PERS

Kapendam Jaya: Jaringan dan Komunikasi Sangat Penting



Kapendam Jaya/Jayakarta, Letkol Inf Herbert Andi Animo Sinaga foto bersama dengan para pemimpin redaksi dan wartawan, usai acara ngopi bareng, di Aula Pendam Jaya, Makodam Jaya, Cililitan, Jakarta, Rabu (11/10) pagi.

JAKARTA (IM) - Penerimaan Kodam (Pendam) Jaya/Jayakarta menggelar silaturahmi bersama Insan Pers Mitra Pendam Jaya, di Aula Pendam Jaya, Makodam Jaya/Jayakarta, Cililitan, Jakarta Timur, Rabu (11/10) pagi.

Kegiatan yang digelar secara sederhana ini dihadiri oleh Sekjen PWI Pusat, Sayid Iskandarsyah, dan pengurus harian PWI Jaya di antaranya Cak Herry SL/Pemimpin Redaksi Laras Post, Beriman Nainggolan, Sekretaris Dewan Kehormatan NPK Provinsi DKI Jakarta, Pawi Pangaribuan, dan Kadirah.

Kapendam Jaya/Jayakarta, Letkol Inf Herbert Andi Animo Sinaga dalam sambutannya mengatakan,

sinergi antara TNI dengan awak media harus selalu terjaga dengan baik.

"Sengaja saya buat acara ini sebagai silaturahmi untuk berkomunikasi antara Pendam Jaya dengan rekan-rekan media," ujarnya.

Selanjutnya ia mengatakan kegiatan tersebut untuk mempererat jaringan dan komunikasi antara TNI dan Wartawan baik dalam hal pemberitaan atau dalam hal lainnya.

"Karena jaringan ini ke depan kita bisa bertambah, dan hubungan ini bukan karena status saya sebagai Kapendam. Artinya apa, jaringan itu bukan hanya di sini aja, dalam bisnis juga. Jadi komunikasi itu sangat penting," tandasnya. ● ber

PENGUMUMAN RENCANA PENGAMBILIHAN PT BARITO OAKWOOD RETAILINDO

Pengumuman Rancangan pengambilhian ini diumumkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilhian Perseroan Terbatas.

PT BARITO OAKWOOD RETAILINDO, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum negara Indonesia dan berkedudukan di Kota Bekasi ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa:

Tuan GLEN PRISMANO HANAFIAH akan mengakuisi 75 % (tujuh puluh lima persen) saham dalam perseroan Melalui pembelian dan pengalihan saham langsung dari pemegang saham.

Segala permintaan informasi dan/atau keberatan dari pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk para kreditor (jika ada) terhadap rancangan pengambilhian ini harus disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman ini ke alamat sebagai berikut:

PT BARITO OAKWOOD RETAILINDO
Jl. Patriot Gang Aman Kampung Dua,
Nomor 99 RT.006, RW. 002,
Jaka Sampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi,
Jawa Barat

Bekasi, 12 Oktober 2023
Direksi PT BARITO OAKWOOD RETAILINDO

PENGUMUMAN RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (KIK) DAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM)

PT Syailendra Capital, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dengan ini bermaksud menyampaikan rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Prospektus REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM sehubungan dengan perubahan ketentuan Imbalan Jasa Manajer Investasi dari semula "maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun" menjadi "maksimum sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) per tahun".

Rincian perubahan ketentuan dalam KIK dan Prospektus tersebut di atas dapat diperoleh di Manajer Investasi.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM serta pihak-pihak yang berkepentingan.

SYAILENDRA

Jakarta, 12 Oktober 2023
Manajer Investasi
PT Syailendra Capital
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan